



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2024. Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan ini menggambarkan posisi keuangan berupa Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2024.

Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2024, disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban keuangan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam laporan keuangan ini dan kami akan selalu berusaha membenahi dan memperbaiki kekurangan yang ada untuk mewujudkan sistem manajemen keuangan yang lebih baik guna menghasilkan laporan keuangan yang lebih sempurna, dan kami berharap laporan keuangan ini dapat memberikan informasi keuangan yang akurat, transparan dan akuntabilitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan *stakeholders* sesuai kepentingannya.

Akhirnya kami memberikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah ikut membantu dan berpartisipasi sehingga Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2024 dapat disusun secara tepat waktu.

Doloksanggul, 11 Februari 2025
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Humbang Hasundutan,


Frans Judika B Pasaribu, SE, M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19790804 200312 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS SOSIAL**

Jl. Sisingamangaraja KM 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu – Doloksanggul KP : 22457
Website <https://dinsos.humbanghasundutankab.go.id/>, e-mail :
dinsos@humbanghasundutankab.go.id
DOLOKSANGGUL

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Doloksanggul, Februari 2025
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Humbang Hasundutan,


Frans Judika B Pasaribu, SE, M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19790804 200312 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Kuangan	4
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	6
2.1 Gambaran Umum Dinas Sosial.....	6
2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD	6
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	9
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	9
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	12
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	13
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	13
4.2 Kebijakan Akuntansi.....	13
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	22
5.1 Penjelasan Atas Pos-PoS Laporan Realisasi Anggaran	22
5.2 Penjelasan Laporan Operasional.....	27
5.3 Penjelasan Atas Pos-PoS Neraca	27
5.4 Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas	30
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN.....	31
5.1 Kelembagaan/Struktur Organisasi	31
5.2 Sumber Daya Manusia (SDM)	31
5.3 Kebijakan yang Ditempuh dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Organisasi	32
BAB VII PENUTUP.....	33

DAFTAR TABEL

- | | | |
|----------|---|---|
| Tabel 1 | : | Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Dinas Sosial |
| Tabel 2 | : | Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial |
| Tabel 3 | : | Rekapitulasi Belanja Pegawai Dinas Sosial |
| Tabel 4 | : | Rekapitulasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Sosial |
| Tabel 5 | : | Belanja Pemeliharaan Dinas Sosial |
| Tabel 6 | : | Belanja Perjalanan Dinas Sosial |
| Tabel 7 | : | Belanja Bantuan Sosial |
| Tabel 8 | : | Rekapitulasi Belanja Moda Dinas Sosial |
| Tabel 9 | : | Neraca Dinas Sosial |
| Tabel 10 | : | Daftar Persediaan Dinas Sosial |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran 2 : Laporan Operasional
- Lampiran 3 : Neraca
- Lampiran 4 : Laporan Perubahan Ekuitas
- Lampiran 5 : Rekapitulasi Barang ke Neraca
- Lampiran 6 : Laporan Mutasi Barang
- Lampiran 7 : Berita Acara Rekonsiliasi
- Lampiran 8 : Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan
- Lampiran 9 : Rekapitulasi Persediaan
- Lampiran 10 : Rekapitulasi Penyusutan Aset

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 10 ayat huruf (g), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD tersebut kemudian dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Laporan Keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP memberikan dua pilihan basis akuntansi, yakni (1) Basis Akrual, atau (2) Basis Kas Menuju Akrual. Basis Kas Menuju Akrual boleh diterapkan paling lambat sampai dengan tahun anggaran 2014 sedangkan Basis Akrual wajib diterapkan mulai tahun anggaran 2015. Pada tahun anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mulai menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2024 pada hakikatnya merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan antar generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan tahun anggaran 2023 yang disusun berdasarkan SAP Berbasis Akrual terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya selama satu periode laporan;
2. Neraca, yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu;
4. Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan;
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun

- sebelumnya;
6. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang berisi penjelasan naratif atas informasi kuantitatif yang bersifat moneter yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Laporan Keuangan Dinas Sosial disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Dinas Sosial terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Melalui Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan, para pengguna laporan diharapkan dapat memperoleh informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan memuat informasi mengenai:

1. Informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. Informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Informasi mengenai informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2024 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan No 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
11. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan No 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
12. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan No 28 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- | | |
|----------------|---|
| Bab I | Pendahuluan |
| 1.1 | maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan |
| 1.2 | Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan |
| 1.3 | Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan |
| Bab II | Gambaran Umum Dinas Sosial dan Pencapaian Target Kinerja APBD |
| Bab III | Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan |
| 3.1 | Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan |
| 3.2 | Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan |
| Bab IV | Kebijakan Akuntansi |

- 4.1 Entitas pelaporan keuangan
- 4.2 Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**
 - 5.1 Pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA
 - 5.2 Neraca
 - 5.3 Laporan Operasional
 - 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan**
- Bab VII Penutup**

BAB II
GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Gambaran Umum Dinas Sosial

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki visi “ **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**”.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial memiliki Misi sebagai Berikut:

1. Mempersiapkan data yang akurat tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
2. Meningkatkan Koordinasi dan Konsultasi dengan lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan;
3. Meningkatkan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
4. Meningkatkan Kualitas SDM Dinas Sosial;
5. Mengoptimalkan PSKS dalam Penanganan Fakir Miskin.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Humbang Hasundutan maka Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan menentukan Tujuannya yaitu **“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”**.

Adapun sasaran yang ingin dicapai/dihasilkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan, yaitu :

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. Meningkatnya Kualitas PSKS dalam Penanganan PMKS
3. Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Sosial.

2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD

Dalam rangka mencapai tujuan guna tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan maka kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja dapat

dituangkan dalam program kerja tahun 2024 yang berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), sebagai berikut:

1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan., Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;

Laporan Keuangan Dinas Sosial Tahun 2024

1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu
1.06.04.2.01.0010	Pemberian layanan Kedaruratan
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan dapat diuraikan sebagai berikut : Anggaran Belanja Tahun Angaran 2024 sebesar Rp. 4.216.949.090,- yang merupakan Belanja Langsung Dengan Realisasi sebesar Rp. 3.971.130.956,- atau 94.17%. Rincian Realisasi per Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1 (dalam Rupiah)
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,427,886,810	2360758248	97.24 %
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,652,431	14,649,000	99.98 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14,652,431	14.649.000	99.98 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,070,661,947	2,036,094,258	98.33 %
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,059,096,054	2,024,541,258	98.32 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	11,565,893	11,553,000	99.89 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	185940432	175,473,897	94.37 %
Penyediaan Komponen Instalsi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,923,000	5,797,200	97.88 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79,903,366	69,774,142	87.32 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21,396,000	21,368,000	99.87 %

Laporan Keuangan Dinas Sosial Tahun 2024

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10,572,066	10,465,914	99.00 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68,146,000	68,068,641	99.89 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60,627,000	54,410,204	89.75 %
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,994,000	4,994,000	99.92%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11,985,000	5,768,204	48.13 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43,648,000	43,648,000	100 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96,005,000	80,130,889	83.47 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan., Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79,390,000	70,780,889	89.16 %
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;	9,775,000	9,350,000	95.65 %
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6,840,000	0	0 %
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	673,874,180	636,347,100	94.43 %
Pengembangan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;	673,874,180	636,347,100	94.43 %
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;	178,000,000	175,764,400	98.74 %
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota;	189,370,600	177,753,400	93.87 %
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota;	257,860,780	249,599,500	96.80 %
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manuasi dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	48,642,800	33,229,800	68.31 %
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	461,104,800	446,794,640	96.90 %
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;	117,301,800	105,422,940	89.87 %
Penyediaan Alat Bantu	46,209,800	45,454,600	98.37 %

Laporan Keuangan Dinas Sosial Tahun 2024

Pemberian layanan Kedaruratan	71,092,000	59,968,340	84.35 %
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	343,803,000	341,371,700	99.29 %
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	33,072,000	33,072,000	98.63%
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	310,731,000	308,299,700	93.65%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	469,944,400	440,460,568	93.73 %
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	469,944,400	440,460,568	93.73 %
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	49,997,500	32,498,500	65.00 %
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	222,413,400	210,613,468	94.69 %
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	197,533,500	197,348,600	99.91 %
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	184,138,900	86,770,400	47.12 %
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	184,138,900	86,770,400	47.12 %
Penyediaan Makanan	134,586,900	67,782,400	50.36%
Penyediaan Sandang	49,552,000	18,988,000	38.31%

Untuk lebih rinci, Belanja yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Sosial dapat dijelaskan pada Bab V CALK Dinas Sosial Tahun 2024 ini

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara keseluruhan realisasi belanja Dinas Sosial tahun 2024 sebesar Rp. 4.216.949.090,- atau Rp. 3.971.130.956,- Adapun sisa anggaran 245.818.134 atau 5.83 %, dalam pelaksanaan Kegiatan tidak ada hambatan yang signifikan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang di selengarakannya.

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum pada Pemerintah Daerah.

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap asset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

4.2 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menyusun Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2024 menggunakan ketentuan dimaksud dan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.

Secara bertahap mengarah pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang dipadukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang saat ini sudah disempurnakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Atas dasar ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan perlakuan akuntansi, Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan menganut Sistem dan Kebijakan Akuntansi yang dapat diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan –LO, beban, asset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundungan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan- LO dan beban.

a. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non

keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi *Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya*.

1) Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
3. Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangkan nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih;
4. Persediaan dicatat sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*). Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang, jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan.

2) *Investasi Jangka Panjang*

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang terdiri atas:

1. Investasi Permanen

▪ Pengakuan

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

▪ Penilaian

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

a. Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah

dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah.

c. Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Metode ini diterapkan untuk investasi bersifat non permanen.

2. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

▪ **Penilaian**

Investasi dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah saldo investasi dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat setelah

dikurangi penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih.

▪ **Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih**

Penyisihan dana bergulir tidak tertagih dihitung berdasarkan persentase tertentu dari saldo dana bergulir yang telah diklasifikasikan berdasarkan Peraturan Daerah.

3) **Aset Tetap**

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam penggerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk

tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

f. Konstruksi Dalam Penggerjaan

Konstruksi dalam penggerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan

keuangan belum selesai seluruhnya.

4) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut: Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lainnya.

b. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban di kategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

c. Pengukuran Pendapatan-LRA

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

d. Pengukuran Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

- c. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

b. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak dapat diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

e. Pengukuran Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

f. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah Daerah dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu pendapatan (*earned*) atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

g. Pengukuran Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Atas Pos-PoS Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial menggambarkan posisi keuangan mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan uraian sebagai berikut :

5.1.1 Penjelasan Pos-pos Pendapatan

Pendapatan Rp 0,00

Dinas Sosial bukan SKPD Penghasil, sehingga tidak ada pendapatan.

5.1.2 Penjelasan Pos-pos Belanja

Belanja.....Rp 3.971.130.956,-

Anggaran Belanja sebesar Rp. **4.216.949.090,-** terealisasi belanja Dinas Sosial per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp **3.971.130.956,-** atau sebesar 94.17 %. Jumlah tersebut terdiri dari belanja operasi dan belanja modal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 (dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
5	Belanja	4.216.949.090	3.971.130.956	94.17	5.600.090.141
5.1	Belanja Operasi	4.182.949.090	3.947.150.956	94.36	5.228.622.041
5.1.01	Belanja Pegawai	2.059.096.054	2.024.541.258	98.32	2.296.523.580
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.686.853.036	1.485.609.698	88.07	2.338.398.461
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	437.000.000	437.000.000	100	593.700.000
5.2	Belanja Modal	34.000.000	23.980.000	70.53	371.468.100
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.000.000	23.980.000	70.53	371.468.100
Surplus/(Defisit)		4.216.949.090	3.971.130.956	94.17	5.600.090.141

A. Belanja Operasi.....Rp 3.947.150.956,-

Anggaran belanja operasi sebesar Rp. 4.182.949.090,- terealisasi sebesar Rp. **3.947.150.956,-** atau **94.36 %**. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan Belanja Bantuan Sosial dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai.....Rp 2.024.541.258,-

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp 2.059.096.054,- terealisir sebesar Rp. 2.024.541.258 atau sebesar 98.32 %.

Belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai berupa gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNS dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3 (dalam rupiah)
REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI
DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

No	Uraian	Anggaran 2024	Realiasi 2024	Realiasi 2023
1.	Belanja Gaji Pokok PNS	1,002,950,110	1,000,842,706	1,073,468,400
2.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	92,934,220	92,617,544	94,686,074
3.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	97,073,500	96,110,000	101,645,000
4.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	15,477,000	15,400,000	0
5.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26,029,500	25,900,000	34,030,000
6.	Belanja Tunjangan Beras PNS	52,985,370	52,721,760	60,108,600
7.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3,307,390	3,227,561	2,222,928
8.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15,180	13,845	15,022
9.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	67,882,229	63,425,994	71,750,538
10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2,063,210	2,059,819	2,177,180
11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6,189,630	6,179,435	6,531,455
12.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	685,007,915	658,861,794	842,707,583
13.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7,180,800	7,180,800	7,180,800
Jumlah Belanja Pegawai		2,059,096,054	2,024,541,258	2.296.523.580

2. Belanja Barang dan JasaRp 1.485.609.698,-
 Dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 1.686.853.036,-
 terealisasi sebesar Rp 1.485.609.698,- atau sebesar 88.07%.
 belanja tersebut terdiri dari:

Tabel 4 (dalam rupiah)
REKAPITULASI BELANJA BARANG DAN JASA
DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

No	Uraian	Anggaran 2024	Realiasi 2024
	Belanja Barang :	422,749,036	319,187,756
1.	Belanja Barang Pakai Habis	422,749,036	319,187,756
2.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	980,000	0
3.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2,886,364	0
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	129,047,972	127,375,316
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,788,000	3,788,000
6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6,380,000	6,380,000
7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5,923,000	5,797,200
8.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6,830,700	6,816,240
9.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	169,280,000	92,476,000
10	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	73,733,000	72,655,000
11	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3,900,000	3,900,000
12	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	20,000,000	0
	Belanja Jasa :	748,875,000	724,018,204
13	Belanja Jasa Kantor	747,335,000	724,018,204
14	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6,000,000	6,000,000
15	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	36,000,000	28,350,000

Laporan Keuangan Dinas Sosial Tahun 2024

16	Honorarium Rohaniwan	800,000	0
17	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	649,350,000	640,700,000
18	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21,600,000	21,600,000
19	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	21,600,000	21,600,000
20	Belanja Tagihan Listrik	11,985,000	5,768,204
21	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1,540,000	0
22	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1,540,000	0
Total Barang dan Jasa		1.686.853.036	1.485.609.698

3. Belanja PemeliharaanRp. 80.130.889,-

Dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 96.005.000,- terealisasi sebesar Rp. 80.130.889,- atau sebesar 83.46 % belanja tersebut terdiri dari:

Tabel 5 (dalam rupiah)
REKAPITULASI BELANJA PEMELIHARAAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024
1.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	79,390,000	70,780,889
2.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6,000,000	6,000,000
3.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	3,775,000	3,350,000
4.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6,840,000	0
	JUMLAH PEMELIHARAAN	96.005.000	80.130.889

Laporan Keuangan Dinas Sosial Tahun 2024

4. Belanja Perjalanan DinasRp. 356.272.849,-
Dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 412.024.000,- terealisasi sebesar Rp. 356.272.849,- atau sebesar 86.47 %.

Tabel 6 (dalam rupiah)
REKAPITULASI BELANJA PERJALANAN DINAS
DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024
1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	259,174,000	225,172,849
2.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	152,850,000	131,100,000
	Belanja Perjalanan Dinas	412,024,000	356,272,849

5. Belanja Bantuan SosialRp 437.000.000,-
Dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 437.000.000 terealisasi sebesar Rp 437.000.000,- atau sebesar 100 % belanja tersebut terdiri dari :

Tabel 7 (dalam rupiah)
REKAPITULASI BELANJA BANTUAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

No	Uraian	Anggaran 2024	Realiasi 2024	Realisasi 2023
1	Belanja bantuan Sosial Uang yang direncanakan pada individu			593.700.000
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	272,000,000	272,000,000	
3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	165,000,000	165,000,000	
	Jumlah	437.000.000	437.000.000	593.700.000

6. Belanja ModalRp 23.980.000,-

Anggaran belanja Modal sebesar Rp. 34.000.000 terealisasi sebesar Rp. 23.980.000 atau 70.53 %. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8 (dalam rupiah)
REKAPITULASI BELANJA MODAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

No	Uraian	Anggaran 2024	Realiasi 2024	Realiasi 2023
1	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (home Use)			57.128.100
2	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya			6.900.000
3	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	19.000.000	9.480.000	
4	Belanja Modal Komputer	15.000.000	14.500.000	
5	Belanja Modal Personal Komputer			30.000.000
6	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran			800.000
7	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya			10.000.000
8	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus			266.640.000
Jumlah		34.000.000	23.980.000	371.468.100

5.2 Penjelasan Laporan Operasional

Beban Operasi pada TA 2024 sebesar Rp 3.947.180.556,- terdiri dari:

Beban Pegawai sebesar Rp 2.024.541.258,-

Beban Barang dan Jasa sebesar Rp 1.485.639.298,-

Beban Bantuan Sosial Rp.437.000.000,-

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 117.144.668,56,-

5.3 Penjelasan Atas Pos-PoS Neraca

Neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Untuk keperluan

penyajian secara komparatif dilakukan penyajian kembali (*restatement*) Neraca per 31 Desember 2024. Penyajian kembali neraca dilakukan dikarenakan terjadi perubahan kebijakan berkaitan dengan mulai diterapkannya SAP Berbasis Akrual pada TA 2020.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 9 (dalam rupiah)
NERACA
DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

URAIAN	2024	2023
ASET		
Aset Lancar	763.400	793.000
Persediaan	763.400	793.000
Jumlah Aset Lancar	763.400	793.000
Aset Tetap	470.481.201,90	563.645.871,13
Tanah	83.200.000	83.200.000
Peralatan dan Mesin	1.176.134.647	1.152.154.647
Gedung dan Bangunan	0	0
Akumulasi Penyusutan	(788.853.445,10)	(671.708.776,54)
Jumlah Aset Tetap	470.481.201,90	563.645.871,13
JUMLAH ASET	471.244.601,90	564.438.871,13
KEWAJIBAN	0	0
Kewajiban Jangka Pendek		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS	471.244.601,90	564.438.871,13
Ekuitas	471.244.601,90	564.438.871,13
Ekuitas	(3.499.886.354,10)	(4.734.234.603,87)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	3.971.130.956	5.298.673.475
JUMLAH EKUITAS	471.244.601,90	564.438.871,13
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	471.244.601,90	564.438.871,13

Pada TA 2024 jumlah Aset Lancar yang dimiliki Dinas Sosial Rp 763.400,- yang terdiri dari persediaan sebesar Rp763.400,- Kas di Bendahara Pengeluaran NIHIL dengan sisa Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan per tanggal 31 Desember 2024 dinyatakan NIHIL serta Pajak TA 2024 telah disetor pada Tahun berjalan.

Rincian Persediaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10 (dalam rupiah)
DAFTAR PERSEDIAAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

No	Jenis	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Anak Hekter No.10	Kotak	6	5.000	30.000
2.	Ballpoint Biasa	Lusin	1	67.000	67.000
3.	Hekter No.3	Buah	1	35.000	35.000
4.	Kertas HVS A4 70 Gram	Rim	2	60.000	120.000
5.	Kertas HVS A4 70 Gram	Rim	2	77.700	155.000
6..	Kertas HVS F4 70 Gram	Rim	2	70.000	140.000
7.	Kertas Jeruk	Bungkus	1	37.000	37.000
8.	Klip Kertas Segitiga	Kotak	5	5.000	25.000
9.	Map Biasa	Buah	11	2.000	22.000
10.	Materai 10.000	Buah	12	11.000	132.000
Jumlah					763.400

Jumlah Aset Tetap pada TA 2024 sebesar Rp. 4 terdiri dari:

1. Tanah : Rp. 83.200.000,-
2. Peralatan dan Mesin :

a.	Komputer	:	Rp. 328.286.092,-
b.	Alat-alat Angkutan	:	Rp. 514.498.555,-
c.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	:	Rp. 306.050.000,-
d.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	:	Rp. 8.300.000,-

3. Gedung dan Bangunan : Rp. 0,00
4. Aset Tetap Lainnya : Rp. 0,00

5.4 Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas Awal (saldo akhir TA 2023)	: Rp. 564.438.871,13
Surplus/(defisit)-LO	: Rp. (4.064.325.224,56)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Koreksi	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	: Rp. -
Koreksi Ekuitas Lainnya	: Rp. -
Ekuitas Akhir TA 2024	: Rp. 471.244.601,90

Tabel Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Perubahan Ekuitas, Mutasi Aset Tetap, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan dan Daftar Penyusutan dapat lihat pada lampiran CALK Dinas Sosial ini.

BAB VI **PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

5.1 Kelembagaan/Struktur Organisasi

Kelembagaan/struktur organisasi pada Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris yang terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Kelompok Jabatan Tertentu
- c. Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari
 1. Kelompok Jabatan Tertentu
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Sosial
 2. Kelompok Jabatan Tertentu

5.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah ASN di Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan per tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 17 orang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Golongan IV = 5 orang
 - b. Golongan III = 11 orang
 - c. Golongan II = 1 orang
- Jumlah = 17 orang**

5.3 Kebijakan yang Ditempuh dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Organisasi

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, SKPD agar tercapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas secara sinergis, baik di lingkungan unit kerja maupun antar SKPD, maka SKPD Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan menempuh kebijakan sebagai berikut:

- a. Mengangkat dan menetapkan beberapa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada masing-masing bidang dan 1 (satu) orang Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai pertanggungjawabannya, yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan;
- b. Mengangkat dan menetapkan Bendahara Pengeluaran SKPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan atas usul Kepala Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan;
- c. Merumuskan dan melaksanakan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas-tugas serta pelayanan pada tiap-tiap bidang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- d. Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan.

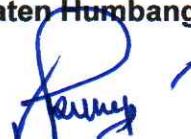
**BAB VII
PENUTUP**

Kewajiban menyajikan Laporan Keuangan pada akhir tahun 2024 sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan yang berakhir 31 Desember 2024, memuat simpulan-simpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kami berharap dengan tersusunnya Laporan Keuangan SKPD ini dapat mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan kinerja menuju pencapaian ***Good Governance***.

Doloksanggul, Februari 2025
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Humbang Hasundutan,



Frans Judika B Pasaribu, SE, M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19790804 200312 1 002



PEMERINTAHAN KAB. HUMBANG HASUNDUTAN

DINAS SOSIAL

Neraca



TAHUN ANGGARAN 2024

1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	471.244.601,90	564.438.871,13
1.1	ASET LANCAR	763.400,00	793.000,00
1.1.12	Persediaan	763.400,00	793.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	763.400,00	793.000,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	470.481.201,90	563.645.871,13
1.3.01	Tanah	83.200.000,00	83.200.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	1.176.134.647,00	1.152.154.647,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	0,00	0,67
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(788.853.445,10)	(671.708.776,54)
	JUMLAH ASET TETAP	470.481.201,90	563.645.871,13
		0,00	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	471.244.601,90	564.438.871,13
		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	471.244.601,90	564.438.871,13
3.1	EKUITAS	471.244.601,90	564.438.871,13
3.1.01	Ekuitas	(3.499.886.354,10)	(4.734.234.603,87)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	3.971.130.956,00	5.298.673.475,00
	JUMLAH EKUITAS	471.244.601,90	564.438.871,13
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	471.244.601,90	564.438.871,13

Kab. Humbang Hasundutan, 10-02-2025
Kepala DINAS SOSIAL

FRANS JUDIKA B. PASARIBU
NIP. 197908042003121002



PEMERINTAH KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS SOSIAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	564.438.871,13	564.129.101,33
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(4.064.325.224,56)	(5.322.913.705,20)
RK PPKD	3.971.130.956,00	5.298.673.475,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREksi NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREksi SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(0,67)	24.550.000,00
Bangunan Gedung Kantor	(0,67)	0,00
EKUITAS AKHIR	471.244.601,90	564.438.871,13

Kab. Humbang Hasundutan, 11 Februari 2025

Kepala DINAS SOSIAL

FRANS JUDIKA B. PASARIBU
NIP. 197908042003121002

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Dec-2024

Provinsi : PROVINSI SUMATERA UTARA
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
Bidang : Bidang Sosial
Unit Organisasi : DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : DINAS SOSIAL
U P B : DINAS SOSIAL

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	1.259.334.647,00
1	TANAH	83.200.000,00
1.01	TANAH	83.200.000,00
2	PERALATAN DAN MESIN	1.176.134.647,00
2.01	ALAT BESAR	0,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	514.498.555,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	0,00
2.04	ALAT PERTANIAN	0,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	239.265.000,00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	9.235.000,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	0,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	0,00
2.10	KOMPUTER	342.786.092,00
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	70.350.000,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	0,00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	0,00
3.02	MONUMEN	0,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	0,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0,00
4.02	BANGUNAN AIR	0,00
4.03	INSTALASI	0,00
4.04	JARINGAN	0,00
5	ASET TETAP LAINNYA	0,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	0,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	0,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	0,00
1.5	ASET LAINNYA	0,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Dec-2024

Provinsi : PROVINSI SUMATERA UTARA
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
Bidang : Bidang Sosial
Unit Organisasi : DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : DINAS SOSIAL
U P B : DINAS SOSIAL

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
3	ASET TIDAK BERWUJUD	0,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	0,00
4	ASET LAIN-LAIN	0,00
4.01	ASET LAIN-LAIN	0,00



Provinsi : PROVINSI SUMATERA UTARA
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
Bidang : Bidang Sosial
Unit Organisasi : DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : DINAS SOSIAL
U P B : DINAS SOSIAL

LAPORAN MUTASI BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN
periode 01 January 2024 s/d 31 December 2024

NO. KODE LOKASI :

NOMOR	SPEZIFIKASI BARANG						JUMLAH AWAL	MUTASI	JUMLAH AKHIR		
	No.	Kode Barang	Reg	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan	Ukuran/ Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Kondisi (B/KB /RB)	Barang	Harga
1	1.3.1.01.003.012.005	0001		Tanah Untuk Makam Umum	-	-	Pembelian	40000	M2	Balk	1
2	1.3.2.02.001.003.002	0001		Pick Up	ISUZU / 4JA1-L	MHCTBR54FGK1 E175451	Besi	Pembelian	2499	Balk	1
3	1.3.2.02.001.004.001	0001		Sepeda Motor	Honda / MEGA PRO	MH1KC1169K2 KC11E-23023	Besi	Pembelian	160 CC	Kurang Balk	1
4	1.3.2.02.001.004.001	0002		Sepeda Motor	HONDA / SUPRA X	MH1IB81109K4 51560	Besi	Pembelian	125 cc	Kurang Balk	1
5	1.3.2.02.001.004.001	0003		Sepeda Motor	Honda / Supra X 125 SW Fi 2016	25101801-KDR- 00020980 MHL1BN111GK1 18814	Besi	Pembelian	124,89	Balk	1
6	1.3.2.05.002.001.024	0001 s/d 0005		Meja 1/2 Biro	KYRA / Olympic	JBNE1115615 Platinum/168	Kayu	Pembelian	1.20x54x70 cm	Kurang Balk	5
7	1.3.2.05.002.001.024	0006		Meja 1/2 Biro	-	-	Kayu	Pembelian	120 x 60 x 75	Balk	6
8	1.3.2.05.002.001.024	0012		Meja 1/2 Biro	KYRA / Platinum/168	-	Kayu	Pembelian	1.25x70x75 cm	Kurang Balk	783.200,00
9	1.3.2.05.002.001.030	0001 s/d 0002		Kursi Rapat	CHITOSE	-	Kayu	Pembelian	90x38x48	Balk	2
10	1.3.2.05.002.001.030	0004		Kursi Rapat	Futura	-	Besi, Busa	Pembelian	90x30x39 cm	Kurang Balk	6



Provinsi : PROVINSI SUMATERA UTARA
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
Bidang : Bidang Sosial
Unit Organisasi : DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : DINAS SOSIAL
UPB : DINAS SOSIAL

LAPORAN MUTASI BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN
periode 01 January 2024 s/d 31 December 2024

NO. KODE LOKASI :

No	Kode Barang	Reg	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan	Ukuran/ Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan (B/Kg /RB)	Kondisi /RB)	JUMLAH AWAL		MUTASI	JUMLAH AKHIR
										Barang	Harga	Barang	Harga
11	1.3.2.05.002.001.030	0001 s/d 0004	Kursi Rapat	Uchida	-	Busa	Pembelian	90x30x35 cm	Kurang Baik	4	2.395.800,00	0	0,00
12	1.3.2.05.002.001.032	0001 s/d 0003	Kursi Putar	-	Fiber/ Busa	Pembelian	60x60x110 cm	Baik	3	5.336.100,00	0	0,00	
13	1.3.2.05.002.001.032	0001 s/d 0006	Kursi Putar	-	Belgio / BS-708 HA	Pembelian	69 x 69 x 92-99	Baik	6	4.726.260,00	0	0,00	
14	1.3.2.05.002.001.032	0001 s/d 0006	Kursi Putar	Ichiko	-	Busa	Pembelian	90x36x36 cm	Baik	6	5.940.000,00	0	0,00
15	1.3.2.05.002.001.035	0001 s/d 0002	Bangku Tunggu	Richiwa / Airport Chair 4 seat	-	Besi	Pembelian	122 x 68 x 77 cm	Baik	2	3.896.200,00	0	0,00
16	1.3.2.05.002.002.001	0001	Jam Mekanis	SEIKO	-	Plastik	Pembelian	-	Baik	1	195.000,00	0	0,00
17	1.3.2.05.002.006.002	0001	Televisi	Polytron / LED	-	Besi	Pembelian	43"	Baik	0	0,00	0	0,00
18	1.3.2.05.002.006.059	0009	Gordyn/Kray	-	-	Pembelian	-	-	Baik	1	35.000.000,00	1	4.980.000,00
19	1.3.2.05.002.006.077	0046	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Samsung / Galaxy Tab A9+	-	Besi, Fiber, Kaca	Pembelian	4/64GB	Baik	0	0,00	0	0,00
20	1.3.2.05.003.001.009	0001 s/d 0002	Meja Kerja Pejabat lain-lain	KYRA / Platinum/ 888	Besi	Pembelian	10 x 70 x 75 cm	-	Baik	2	3.557.440,00	0	0,00



Provinsi : PROVINSI SUMATERA UTARA
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
 Bidang : Bidang Sosial
 Unit Organisasi : DINAS SOSIAL
 Sub Unit Organisasi : DINAS SOSIAL
 U P B : DINAS SOSIAL

LAPORAN MUTASI BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

periode 01 January 2024 s/d 31 December 2024

TAHUN ANGGARAN

NO. KODE LOKASI :

No	Kode Barang	Reg	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Ukuran/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan (B/Kg /RB)	JUMLAH AWAL		MUTASI		JUMLAH AKHIR						
									No. Sertifikat No. Pabrik No. Chassis No. Mesin	Kondisi Barang	Harga	Barang	Harga	Berkurang	Bertambah	Barang	Harga		
21	1.3.2.05.003.004.007	0001 s/d 0050	Kursi Rapat Ruangan Rapat	Richiwa / R 818 NK Staf	-	Besi/Busa	Pembelian 10 x 34 cm, c	Balk	50	16.093.000,00	0	0,00	50	16.093.000,00		Barang	Harga		
22	1.3.2.05.003.007.010	0001 s/d 0004	Lemari Arsip Pejabat lainnya	Home / RBU-04	-	Kayu, Kaca	Pembelian 0 x 40 x 210	Balk	4	28.459.200,00	0	0,00	4	28.459.200,00		Berkurang	Bertambah	Barang	Harga
23	1.3.2.10.001.002.001	0001 s/d 0003	P.C Unit	HP / Desktop HP Prone 400 G2 AIO 1AL06PA/BAS	-	-	Pembelian	Balk	3	40.739.961,00	0	0,00	3	40.739.961,00					
24	1.3.2.10.001.002.001	0018	P.C Unit	EA1 HP	-	Pembelian	14 "	Balk	1	9.950.000,00	0	0,00	1	9.950.000,00					
25	1.3.2.10.001.002.002	0001 s/d 0004	Lap Top	LENOVO / Leovo Notebook IP100 ACER / Z1402-308T	-	Pembelian	-	Balk	4	36.448.000,00	0	0,00	4	36.448.000,00					
26	1.3.2.10.001.002.002	0014	Lap Top	-	-	Pembelian	-	Balk	1	5.799.674,00	0	0,00	1	5.799.674,00					
27	1.3.2.10.001.002.002	0025	Lap Top	Acer / Travelmate P214 Core -15	-	Pembelian	-	Balk	0	0,00	0	0,00	1	14.500.000,00					
28	1.3.2.10.002.003.003	0001 s/d 0002	Printer (peralatan Personal Komputer)	Canon / Pxma G 3000	-	Pembelian	Fiber	Balk	2	5.799.676,00	0	0,00	2	5.799.676,00					
29	1.3.2.10.002.003.003	0001 s/d 0007	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L300 All in One Ink Tank Printer	-	Pembelian	-	Balk	7	18.649.981,00	0	0,00	7	18.649.981,00					

LAPORAN MUTASI BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN
periode 01 January 2024 s/d 31 December 2024



JUMLAH	579,337,847.00	0.00	603,317,847.00

DOLOKSANGGU, 31 Desember 2024
PENGURUS BARANG PENGGUNA

AGUS KURNIAWAN PANDJANGAN , S.M.

NIP. 19830826 200502 1 001



MENGETAHUI
KEPALA DINAS
FRANS JUDIKA B. PASARIBU, S.E., M.SI
NIP. 19790804 200312 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
REKAPITULASI MUTASI BARANG

TAHUN ANGGARAN 2024

BIDANG PEMERINTAHAN : 9
UNIT ORGANISASI : 9.1
SUB UNIT ORGANISASI : 9.1.1
UNIT PENGGUNA BARANG : 9.1.1.1

Bidang Sosial
DINAS SOSIAL
DINAS SOSIAL
DINAS SOSIAL

KODE	NAMA BARANG	KEADAAN PER 31 DESEMBER 2023	BERIKURANG	BERTAMBAH	KEADAAN PER 31 DESEMBER 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2024	NILAI BUKU
01	TANAH	83.200.000,00	-	-	83.200.000,00	-	83.200.000,00
02	ALAT-ALAT ANGKUTAN	514.498.555,00	-	-	514.498.555,00	298.647.126,43	215.851.428,57
03	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	301.070.000,00	-	-	4.980.000,00	306.050.000,00	220.615.160,00
04	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	8.300.000,00	-	-	8.300.000,00	5.533.333,33	2.766.666,67
05	KOMPUTER	328.285.092,00	-	-	19.000.000,00	347.286.092,00	264.057.825,33
		1.235.354.647,00	-	-	23.980.000,00	1.259.334.647,00	788.853.445,10
							470.481.201,90

SALDO ASET TETAP DINAS SOSIAL PER 31 DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2023

1.235.354.647,00

BELANJA MODAL TAHUN 2024
PERALATAN DAN MESIN

Tablet (Alat Rumah Tangga Lain-lain)	1	4.500.000,00	4.500.000,00
Lap Top	1	14.500.000,00	14.500.000,00
Televisi	1	4.980.000,00	4.980.000,00
			23.980.000,00

KEADAAN PER 31 DESEMBER 2024
AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2024
NILAI BUKU

1.259.334.647,00
 788.853.445,10 ✓
 470.481.201,90

MENGETAHUI
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

FRANS JUDIKA B. PASARIBU, S.E., M.Si
 NIP. 19790804 200312 1 002

DOLOKSANGGUL, 31 Desember 2024
PENGURUS BARANG
[Signature]

AGUS KURNIAWAN PANDIANGAN, S.M.
 NIP. 19830826 200502 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DINAS SOSIAL

Jl. Sisingamangaraja Km. 2,5 Kompleks Perkantoran Pemkab. Humbang Hasundutan Tano Tubu Kode Pos 22457
Website : <http://dinsos.humbanghasundutankab.go.id>, email : dinsoshumbanghasundutankab.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : 000.2.3.2/2953/Sosial /xii/2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di BPKPD Kabupaten Humbang Hasundutan, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : Agus Kurniawan Pandiangan, S.M.
NIP : 19830826 200502 1 001
Pangkat/Gol : Penata Muda/ III a
Jabatan : Pelaksana

Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Sosial, selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA

II. Nama : Mey Rianna Pasaribu, S.E.
NIP : 19850503 200502 2 002
Pangkat/ Gol : Penata Tk.I/ III d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dalam hal ini bertindak sebagai Pelaksana Akuntansi pada Dinas Sosial, selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan membandingkan data laporan BMD per **31 Desember 2024**. Dengan hasil sebagaimana dalam Lampiran.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan dalam rangka mendukung Laporan BMD.

PIHAK KEDUA,

MEY RIANNA PASARIBU, S.E.
NIP. 19850503 200502 2 002

PIHAK PERTAMA,

AGUS KURNIAWAN PANDIANGAN, S.M.
NIP. 19830826 200502 1 001



Lampiran

Nomor

Tanggal

BERITA ACARA REKONSILIASI

1. Saldo Awal

No	Uraian	Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Sesuai	Tidak Sesuai	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A ASET LANCAR					
	Persediaan	-	-	-	-
B ASET TETAP		1.254.254.647,00	1.254.254.647,00		
1. Tanah	83.200.000,00	83.200.000,00	-	-	-
2. Peralatan dan Mesin	1.171.154.647,00	1.171.154.647,00	-	-	-
3. Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-	-
5. Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
6. Konstruksi Dalam Penggerusan	-	-	-	-	-
7. Akumulasi Penyusutan	759.030.027,95	759.030.027,95	-	-	-
C ASET LAINYA					
1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
2. Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-
3. Aset Lain-lain	-	-	-	-	-
4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-
5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-	-

Catatan Hasil Rekonsiliasi :

1.
2.
3.

2. Saldo Akhir

No	Uraian	Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Sesuai	Tidak Sesuai	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A ASET LANCAR					
Persediaan					
B ASET TETAP		1.259.334.647,00	1.259.334.647,00		
1.	Tanah	83.200.000,00	83.200.000,00	-	-
2.	Peralatan dan Mesin	1.176.134.647,00	1.176.134.647,00	-	-
3.	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-
5.	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6.	Konstruksi Dalam Penggerusan	-	-	-	-
7.	Akumulasi Penyusutan	788.853.445,10	788.853.445,10	-	-
C ASET LAINYA					
1.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
2.	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
3.	Aset Lain-lain	-	-	-	-
4.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
5.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-

Catatan Hasil Rekonsiliasi :

1.
2.
3.
4.

PIHAK KEDUA,

MEY RIANNA PASARIBU, S.E.
NIP. 19850503 200502 2 002

PIHAK PERTAMA,

AGUS KURNIAWAN PANDIANGAN, S.M.
NIP. 19830826 200502 1 001

Mengetahui :
KEPALA DINAS SOSIAL,

FRANS JUDIKA B. PASARIBU, S.E., M.Si.
NIP. 19790804 200312 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DINAS SOSIAL

Jl. Sisingamangaraja Km. 2,5 Kompleks Perkantoran Pemkab. Humbang Hasundutan Tano Tubu Kode Pos 22457
Website : <http://dinsos.humbanghasundutankab.go.id>, email : dinsoshumbanghasundutankab.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : 000.2.3.2/2954 /Sosial /XII/2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di BPKPD Kabupaten Humbang Hasundutan, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : Agus Kurniawan Pandiangan, S.M.
NIP : 19830826 200502 1 001
Pangkat/ Gol : Penata Muda/ III a
Jabatan : Pelaksana

Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengguna, selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA

II. Nama : Marintan Rianita Simbolon, S.E.
NIP : 19840625 200904 2 004
Pangkat/ Gol : Penata Tk. I/ III d
Jabatan : Kepala Bidang Aset Daerah

Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengelola, selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan membandingkan data laporan BMD per **31 Desember 2024**. Dengan hasil sebagaimana dalam Lampiran.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan dalam rangka mendukung Laporan BMD.

PIHAK KEDUA

MARINTAN RIANITA SIMBOLON, S.E.
NIP. 19840625 200904 2 004

PIHAK PERTAMA,

AGUS KURNIAWAN PANDIANGAN, S.M.
NIP. 19830826 200502 1 001

Lampiran

Nomor

Tanggal

BERITA ACARA REKONSILIASI

1. Saldo Awal

No	Uraian	Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Sesuai	Tidak Sesuai	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	ASET LANCAR				
	Persediaan	-	-	-	-
B	ASET TETAP	1.254.254.647,00	1.254.254.647,00		
1.	Tanah	83.200.000,00	83.200.000,00	-	-
2.	Peralatan dan Mesin	1.171.154.647,00	1.171.154.647,00	-	-
3.	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-
5.	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6.	Konstruksi Dalam Penggerusan	-	-	-	-
7.	Akumulasi Penyusutan	759.030.027,95	759.030.027,95	-	-
C	ASET LAINYA				
1.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
2.	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
3.	Aset Lain-lain	-	-	-	-
4.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
5.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-

Catatan Hasil Rekonsiliasi :

1.
2.
3.

2. Saldo Akhir

No	Uraian	Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Sesuai	Tidak Sesuai	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	ASET LANCAR				
	Persediaan	-	-	-	-
B	ASET TETAP	1.259.334.647,00	1.259.334.647,00		
1.	Tanah	83.200.000,00	83.200.000,00	-	-
2.	Peralatan dan Mesin	1.176.134.647,00	1.176.134.647,00	-	-
3.	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-
5.	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6.	Konstruksi Dalam Penggerusan	-	-	-	-
7.	Akumulasi Penyusutan	788.853.445,10	788.853.445,10	-	-
C	ASET LAINNYA				
1.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
2.	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
3.	Aset Lain-lain	-	-	-	-
4.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
5.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-

Catatan Hasil Rekonsiliasi :

1.
-
2.
-
3.
-
4.
-

3.

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)		Hasil Rekonsiliasi		Ket
		Tambah	Kurang	Disetujui	Perbaikan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Cara Perolehan	-	-	-	-	-
	a. Pengadaan dari APBD	-	-	-	-	-
	LRA Rp	-	-	-	-	-
	b. Hibah	-	-	-	-	-
	c. Pelaksanaan dari perjanjian/kontrak	-	-	-	-	-
	d. Ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-
	e. Putusan Pengadilan	-	-	-	-	-
	f. Divestasi	-	-	-	-	-
	g. Hasil inventarisasi	-	-	-	-	-
	h. Hasil tukas menukar	-	-	-	-	-
	i. Pembatalan penghapusan	-	-	-	-	-
	j. Perolehan lainnya	-	-	-	-	-
2	Penggunaan	-	-	-	-	-
	a. Pengalihan atau penyerahan BMD	-	-	-	-	-
3	Penerimaan internal pengguna barang	-	-	-	-	-
4	Pengeluaran internal pengguna barang	-	-	-	-	-
5	Reklasifikasi	-	-	-	-	-
6	Koreksi	-	-	-	-	-
7	Penghapusan	-	-	-	-	-
	a. Pemindahtanganan BMD	-	-	-	-	-
	b. Penyerahan atau pengalihan Status Penggunaan BMD	-	-	-	-	-
	c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	-	-	-	-	-
	d. Ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-
	e. Pemusnahan	-	-	-	-	-
	f. Sebab Lain	-	-	-	-	-

Catatan Hasil Rekonsiliasi :

1.
2.
3.

PIHAK KEDUA,

MARINTAN RIANITA SIMBOLON, S.E.
NIP. 19840625 200904 2 004

PIHAK PERTAMA,

AGUS KURNIAWAN PANDIANGAN, S.M.
NIP. 19830826 200502 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN D I N A S S O S I A L

Jl. Sisingamangaraja Km 2.5 – Kompleks Perkantoran Tano Tubu Kode Pos 22457

Website : <http://www.humbanghasundutan.go.id>, e-mail : dinsoshumbanghasundutankab.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK PERSEDIAAN NO. 000.2.3.2/ 2957 /SOSIAL/XII/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami telah melakukan pemeriksaan fisik atas persediaan per 31 Desember 2024, persediaan telah disusun dengan sistem periodik berdasarkan harga pembelian terakhir pada Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan dengan perincian sebagai berikut:

1. Persediaan Kondisi Baik

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
				(Rp)	(Rp)
1	Anak Hekter No.10	Kotak	6	5.000	30.000
2	Ballpoint Biasa	Lusin	1	67.000	67.000
3	Hekter No.3	Buah	1	35.000	35.000
4	Kerta HVS A4 70 gram	Rim	2	60.000	120.000
5	Kerta HVS A4 70 gram Rp.	Rim	2	77.700	155.400
6	Kertas HVS F4 70 gram	Rim	2	70.000	140.000
7	Kertas Jeruk Rp. 37.000,-	Bungkus	1	37.000	37.000
8	Klip Kertas Segitiga	Kotak	5	5.000	25.000
9	Map Biasa	Buah	11	2.000	22.000
10	Materai 10000	Buah	12	11.000	132.000
Jumlah					763.400

2 Persediaan Rusak/ Expired

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
				(Rp)	(Rp)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
Jumlah					-

Yang diperiksa

Bendahara Barang

Agus Kurniawan Pandiangan, S.M.

NIP. 19830826 200502 1 001

Tim Pemeriksa

1. Nama : Mey Rianna Pasaribu, SE (.....)

NIP. 19850503 200502 2 002

Mengetahui

Mengetahui

Kepala Dinas Sosial,

Frans Judika. B. Pasaribu, S.E., M.Si

NIP. 19790804 200312 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
D I N A S S O S I A L

Jl. Sisingamangaraja Km 2.5 - Kompleks Perkantoran Tano Tubu-Dolok Sanggul Kode Pos 22457

Website : <http://www.humbanghasundutan.go.id>, e-mail : dinsoshumbanghasundutankab.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK PERSEDIAAN
NO. 000.2.3.2/ 2956 /SOSIAL/XII/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami telah melakukan pemeriksaan fisik atas daftar persediaan per 31 Desember 2024, daftar persediaan telah disusun dengan sistem periodik berdasarkan harga pembelian terakhir pada Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan dengan perincian sebagai berikut:

1 Alat Tulis Kantor

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
			(Rp)	(Rp)
1	Amplop Coklat F4	0	8.000	-
2		0	15.000	-
3	Amplop Putih Sedang	0	45.000	-
4	Anak Hekter No.10	6	5.000	30.000
5	Anak Hekter No. 3	0	11.000	-
6	Ballpoint Balliner	0	216.000	-
7	Ballpoint Biasa	1	67.000	67.000
8	Bantalan Cap Stempel Kecil	0	18.300	-
9	Binder Klip No. 107	0	8.000	-
10	Binder Klip No. 111	0	11.000	-
11	Binder Klip No. 155	0	14.000	-
12	Binder Klip No. 200	0	17.000	-
13	Binder Klip No. 260	0	20.000	-
14	Box File	0	50.690	-
15	Box File Rp. 50.500,-	0	50.500	-
16	Buku Agenda Lux	0	100.000	-
17	Buku Agenda Surat Isi 500	0	131.332	-
18	Buku Ekspedisi Isi 100	0	15.000	-
19	Buku Tulis isi 58 lembar	0	4.100	-
20	Flashdisk 32GB	0	200.000	-
21	Hekter No.10	0	22.500	-
22	Hekter No.3	1	35.000	35.000
23	Isolasi/ Lakban Besar	0	19.300	-
24	Isolasi Plastik Bening Roll Besar 48	0	16.300	-
25	Kertas Foto	0	71.500	-
26	Kerta HVS A4 70 gram	2	60.000	120.000
27	Kerta HVS A4 70 gram Rp. 77.700,-	2	77.700	155.400
28	Kertas HVS F4 70 gram	2	70.000	140.000
29	Kertas HVS Folio 70 gram Rp.77.000,-	0	77.000	-
30	Kertas HVS F4 Warna 70 gram	0	80.000	-
31	Kertas Jeruk	0	37.619	-
32	Kertas Jeruk Rp. 37.000,-	1	37.000	37.000
33	Kertas Plano	0	3.000	-
34	Kertas Tempel Pengingat	0	40.000	-
35	Klip Kertas Segitiga	5	5.000	25.000
36	Lem Kertas	0	12.000	-
37	Map Besar/ Brief Ordner	0	21.500	-
38	Map Biasa	11	2.000	22.000
39	Map Biasa (Rp. 3.000,-)	0	3.000	-

40	Map Plastik Kantong Restleting	0	17.000	-
41	Map Plastik	0	17.000	-
42	Map Kantong Gantung	0	15.000	-
43	Map Snellhecter	0	2.600	-
44	Ordner 203	0	29.000	-
45	Ordner Surat Kecil	0	21.000	-
46	Ordner Folio	0	45.000	-
47	Pelobang Kertas	0	45.000	-
48	Pelobang Kertas Rp. 20.000,-	0	20.000	-
49	Pelobang Kertas uk. Besar(Rp. 75.0000	0	75.000	-
50	Penggaris Besi/ Aluminium	0	35.000	-
51	Penggaris Lokal	0	15.000	-
52	Penghapus Tinta	0	16.000	-
53	Penghapus Karet	0	3.000	-
54	Pensil 2B	0	35.000	-
55	Pensil	0	78.000	-
56	Plastik Jilid Transparan uk. Folio	0	24.000	-
57	Post It Besar	0	20.000	-
58	Post It Sedang	0	17.000	-
59	Post It Kecil	0	12.000	-
60	Refill Tinta Spidol	0	48.600	-
61	Spidol Marker	0	5.700	-
62	Spidol White Board Besar	0	25.100	-
63	Stabilo	0	13.000	-
64	Tinta Printer Epson L350 Biru	0	200.000	-
65	Tinta Printer Epson L350 Hitam	0	200.000	-
66	Tinta Printer Epson L350 Kuning	0	200.000	-
67	Tinta Printer Epson L350 Merah	0	200.000	-
68	Tinta Printer Hitam	0	100.000	-
69	Tinta Printer Warna/ Tinta Printer	0	130.000	-
70	Tinta Printer Rp. 150.000,-	0	150.000	-
71	Tinta Stempel	0	17.000	-
72	Tipe-X Penghapus Tinta	0	15.000	-
73	Letter File	0	22.000	-
Jumlah				631.400

2 Belanja Cetak

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga
		Barang	(Rp)	(Rp)
1	Amplop Pakai Lambang Daerah Berwa	0	1.000	-
2	Amplop Berlogo	0	60.000	-
3	Blanko Disposisi Standard	0	18.676	-
4	Kop Surat Berlogo Kuning Emas	0	500.000	-
5	Kop Surat Berlogo	0	140.000	-
6	Map Cetak Bahan Kertas	0	6.500	-
7	Kop Surat Lambang Daerah	0	118.726	-
Jumlah				-

3 Belanja Materai

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga
			(Rp)	(Rp)
1	Materai 10000	12	11.000	132.000
Jumlah				132.000

4 Belanja Alat Listrik

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
			(Rp)	(Rp)
1	Kabel Roll 10 mm	0	151.800	-
2	Lampu Hemat Energi Keong 23 Watt	0	50.700	-
3	Lampu Hemat Energi	0	55.000	-
4	Stop Kontak 4 Lubang+Saklar	0	130.000	-
5	Terminal Blok 2512	0	15.600	-
Jumlah				0

5 Alat Kebersihan

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Alas Kaki Kain	0	70.000	-
2	Alat Semprot	0	34.800	-
3	Detergen Bubuk	0	21.000	-
4	Ember Bahan Plastik	0	27.400	-
5	Gayung Air Plastik Besar	0	8.500	-
6	Gembok	0	75.000	-
7	Kain Lap/ Serbet	0	10.000	-
8	Kain Pel	0	30.000	-
9	Kemoceng	0	35.000	-
10	Keranjang Sampah	0	20.000	-
11	Keset Kain	0	36.500	-
12	Keset Karet	0	78.500	-
13	Pembersih Kaca	0	10.900	-
14	Pembersih Lantai Carbol Lysol	0	30.000	-
15	Pembersih Lantai	0	20.000	-
16	Pewangi Ruangan	0	40.000	-
17	Sabun Cuci Tangan	0	21.500	-
18	Sapu Lidi + Stick	0	20.000	-
19	Sapu Plastik	0	45.000	-
20	Serokan Plastik	0	20.000	-
21	Sikat Kamar Mandi	0	30.000	-
22	Tisu	0	20.014	-
Jumlah				-

Yang diperiksa
Bendahara Barang

Agus Kurniawan Pandiangan, S.M.
NIP. 19830826 200502 1 001

Tim Pemeriksa
1. Nama : Mey Rianna Pasaribu, SE (.....)
NIP. 19850503 200502 2 002

Mengetahui
Kepala Dinas Sosial,

Frans Judika. B. Pasaribu, S.E., M.Si
NIP. 19790804 200312 1 002

REKAPITULASI PERSEDIAAN T.A 2024

NAMA SKPD :

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

NO	JENIS BARANG	SATUAN BARANG	PERSEDIAAN AWAL 2023 (UNIT)	PEMBELIAN 2024 (UNIT)	PEMAKAIAN 2024 (UNIT)	HARGA SATUAN (HARGA)	SALDO AKHIR PERSEDIAAN		BEBAN PERSEDIAAN NILAI PERSEDIAAN
							UNIT	NILAI PERSEDIAAN	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5)-6	9 = 7*8	10= (4+5)-8 11=7*10
1	Ampllop Coklat F4	Buah	0	43	43	8.000	0	-	43 344.000
2	Ampllop Surat Putih	Dos	0	5	5	15.000	0	-	5 75.000
3	Ampllop Putih Sedang	Kotak	0	2	2	45.000	0	-	2 90.000
4	Anak Hekter No.10	Kotak	2	126	122	5.000	6	30.000	122 610.000
5	Anak Hekter No. 3	Kotak	0	16	16	11.000	0	-	16 176.000
6	Ballpoint Balliner	Lusin	0	3	3	216.000	0	-	3 648.000
7	Ballpoint Biasa	Lusin	1	69	69	67.000	1	67.000	69 4.623.000
8	Bantalan Cap Stempel Kecil	Buah	0	3	3	18.300	0	-	3 54.900
9	Binder Klip No. 107	Kotak	0	31	31	8.000	0	-	31 248.000
10	Binder Klip No. 111	Kotak	0	65	65	11.000	0	-	65 715.000
11	Binder Klip No. 155	Kotak	0	15	15	14.000	0	-	15 210.000
12	Binder Klip No. 200	Kotak	0	26	26	17.000	0	-	26 442.000
13	Binder Klip No. 260	Kotak	0	72	72	20.000	0	-	72 1.440.000
14	Box File	Buah	0	8	8	50.690	0	-	8 405.520
15	Box File Rp. 50.500,-	Buah	0	12	12	50.500	0	-	12 606.000
16	Buku Agenda Lux	Buah	0	3	3	100.000	0	-	3 300.000
17	Buku Agenda Surat Isi 500	Buah	0	2	2	131.332	0	-	2 262.664
18	Buku Ekspedisi Isi 100	Buah	0	10	10	15.000	0	-	10 150.000
19	Buku Tulis Isi 58 lembar	Buah	0	9	9	4.100	0	-	9 36.900
20	Flashdisk 32GB	Unit	0	10	10	200.000	0	-	10 2.000.000
21	Hekter No.10	Buah	0	39	39	22.500	0	-	39 877.500
22	Hekter No.3	Buah	1	12	12	35.000	1	35.000	12 420.000
23	Isolasi/ Lakban Besar	Roll	0	17	17	19.300	0	-	17 328.100
24	Isolasi Plastik Bening Roll Besar 48	Roll	0	8	8	16.300	0	-	8 130.400
25	Kertas Foto	Pak	0	3	3	71.500	0	-	3 214.500
26	Kerta HVS A4 70 gram	Rim	1	68	67	60.000	2	120.000	67 4.020.000
27	Kerta HVS A4 70 gram Rp. 77.700,-	Rim	0	50	48	77.700	2	155.400	48 3.729.600

28	Kertas HVS F4 70 gram	Rim	5	199	202	70.000	2	140.000	202	14.140.000
29	Kertas HVS Folio 70 gram	Rim	0	8	8	77.000	0	-	8	616.000
30	Kertas HVS F4 Warna 70 gram	Rim	0	4	4	80.000	0	-	4	320.000
31	Kertas Jeruk	Bungkus	0	1	1	37.619	0	-	1	37.619
32	Kertas Jeruk Rp. 37.000,-	Bungkus	1	6	6	37.000	1	37.000	6	222.000
33	Kertas Plano	Lembar	0	3210	3210	3.000	0	-	3210	9.630.000
34	Kertas Tempel Pengingat	Pcs	0	6	6	40.000	0	-	6	240.000
35	Klip Kertas Segitiga	Kotak	2	201	198	5.000	5	25.000	198	990.000
36	Lem Kertas	Tube	0	27	27	12.000	0	-	27	324.000
37	Map Besar/ Brief Ordner	Buah	0	65	65	21.500	0	-	65	1.397.500
38	Map Biasa	Buah	10	703	702	2.000	11	22.000	702	1.404.000
39	Map Biasa (Rp. 3.000,-)	Buah	0	212	212	3.000	0	-	212	636.000
40	Map Plastik Kantong Restleting	Buah	0	58	58	17.000	0	-	58	986.000
41	Map Plastik	Buah	0	14	14	17.000	0	-	14	238.000
42	Map Kantong Gantung	Buah	0	15	15	15.000	0	-	15	225.000
43	Map Snellhecter	Buah	0	40	40	2.600	0	-	40	104.000
44	Ordner 203	Buah	0	23	23	29.000	0	-	23	667.000
45	Ordner Surat Kecil	Buah	0	21	21	21.000	0	-	21	441.000
46	Ordner Folio	Buah	0	6	6	45.000	0	-	6	270.000
47	Pelobang Kertas	Buah	0	6	6	45.000	0	-	6	270.000
48	Pelobang Kertas Rp. 20.000,-	Buah	0	1	1	20.000	0	-	1	20.000
49	Pelobang Kertas uk. Besar(Rp.75.00	Buah	0	2	2	75.000	0	-	2	150.000
50	Penggaris Besi/ Aluminium	Buah	0	6	6	35.000	0	-	6	210.000
51	Penggaris Lokal	Buah	0	19	19	15.000	0	-	19	285.000
52	Penghapus Tinta	Lusin	0	22	22	16.000	0	-	22	352.000
53	Penghapus Karet	Lusin	0	12	12	3.000	0	-	12	36.000
54	Pensil 2B	Lusin	0	14	14	35.000	0	-	14	490.000
55	Pensil	Lusin	0	2	2	78.000	0	-	2	156.000
56	Plastik Jilid Transparan uk. Folio	Bungkus	0	4	4	24.000	0	-	4	96.000
57	Post It Besar	Bungkus	0	25	25	20.000	0	-	25	500.000
58	Post It Sedang	Bungkus	0	6	6	17.000	0	-	6	102.000
59	Post It Kecil	Bungkus	0	2	2	12.000	0	-	2	24.000
60	Refill Tinta Spidol	Botol	0	1	1	48.600	0	-	1	48.600
61	Spidol Marker	Buah	0	36	36	5.700	0	-	36	205.200

62	Spidol White Board Besar	Buah	0	6	25.100	0	-	6	150.600
63	Stabilo	Buah	0	15	15.000	0	-	15	195.000
64	Tinta Printer Epson L350 Biru	Botol	0	18	18.000	0	-	18	3.600.000
65	Tinta Printer Epson L350 Hitam	Botol	0	18	18.000	0	-	18	3.600.000
66	Tinta Printer Epson L350 Kuning	Botol	0	15	15.000	0	-	15	3.000.000
67	Tinta Printer Epson L350 Merah	Botol	0	14	14.000	0	-	14	2.800.000
68	Tinta Printer Hitam	Buah	0	45	45.000	0	-	45	4.500.000
69	Tinta Printer Warna / Tinta Printer	Buah	0	14	14.000	0	-	14	1820.000
70	Tinta Printer Rp. 150.000,-	Buah	0	2	2.000	0	-	2	300.000
71	Tinta Stempel	Botol	0	13	13.000	0	-	13	221.000
72	Tipe-X Penghapus Tinta	Set	0	9	9.000	0	-	9	135.000
73	Letter File	Buah	0	3	3.000	0	-	3	66.000
74	Amplop Pakai Lambang Daerah	Lembar	0	68	68.000	0	-	68	68.000
75	Amplop Berlogo	Kotak	0	8	8.000	0	-	8	480.000
76	Blanko Disposisi Standard	Buah	0	14	14.000	0	-	14	261.464
77	Kop Surat Berlogo Kuning Emas	Rim	0	1	1.000	0	-	1	500.000
78	Kop Surat Berlogo	Rim	0	1	1.000	0	-	1	140.000
79	Map Cetak Bahana Kertas	Buah	0	103	103.000	0	-	103	669.500
80	Kop Surat Lambang Daerah	Rim	0	4	4.000	0	-	4	474.904
81	Materai 10000	Buah	14	604	606.000	12	132.000	606	6.666.000
82	Alas Kaki Kain	Buah	0	3	3.000	0	-	3	210.000
83	Alat Sempit	Buah	0	3	3.000	0	-	3	104.400
84	Detergen Bubuk	Buah	0	4	4.000	0	-	4	84.000
85	Ember Bahan Plastik	Buah	0	8	8.000	0	-	8	219.200
86	Gayung Air Plastik Besar	Buah	0	8	8.000	0	-	8	68.000
87	Gembok	Buah	0	4	4.000	0	-	4	300.000
88	Kain Lap/ Serbet	Buah	0	17	17.000	0	-	17	170.000
89	Kain Pel	Buah	0	6	6.000	0	-	6	180.000
90	Kemoceng	Buah	0	3	3.000	0	-	3	105.000
91	Keranjang Sampah	Buah	0	6	6.000	0	-	6	120.000
92	Keset Kain	Buah	0	12	12.000	0	-	12	438.000
93	Keset Karet	Buah	0	3	3.000	0	-	3	235.500
94	Pembersih Kaca	Botol	0	10	10.000	0	-	10	109.000
95	Pembersih Lantai Carbol Lysol	Liter	0	4	30.000	0	-	4	120.000

96	Pembersih Lantai	Buah	0	10	20.000	0	-	10	200.000	
97	Pewangi Ruangan	Buah	0	5	40.000	0	-	5	200.000	
98	Sabun Cuci Tangan	Buah	0	6	21.500	0	-	6	129.000	
99	Sapu Lidi + Stick	Buah	0	9	20.000	0	-	9	180.000	
100	Sapu Plastik	Buah	0	8	45.000	0	-	8	360.000	
101	Serokan Plastik	Buah	0	6	20.000	0	-	6	120.000	
102	Sikat Kamar Mandi	Buah	0	6	30.000	0	-	6	180.000	
103	Tisu	Kotak	0	45	45	20.014	0	-	45	900.630
104	Kabel Roll 10 mm	Roll	0	12	151.800	0	-	12	1.821.600	
105	Lampu Hemat Energi Keong 23	Buah	0	12	50.700	0	-	12	608.400	
106	Lampu Hemat Energi	Buah	0	20	55.000	0	-	20	1.100.000	
107	Stop Kontak 4 Lubang+Saklar	Buah	0	16	130.000	0	-	16	2.080.000	
108	Terminal Blok 2512	Buah	0	13	15.600	0	-	13	202.800	
Jumlah									763.400	

Jumlah Persediaan Per 31 Desember 2021 Rp 635.500,-

Yang diperiksa
Bendahara Barang

Agus Kurniawan Pandiangan,S.M.
NIP. 198308262005021001

Tim Pemeriksa
1. Nama : Mey Rianna Pasaribu, SE (.....)
NIP. 19850503 200502 2 002

Mengatahui
Kepala Dinas Sosial,

Frans Judika B. Pasaribu, S.E., M.Si
NIP. 19790804 200312 1 002



No Barcode	Nama Barang	Tanggal Tahun	Nilai	Umur Penyusutan/Bulan	Beban sudah Penyusutan s.d. berjalan hingga 2021	Masa Manfaat sudah berjalan hingga 2022	Beban Semester I	Beban Semester II	Akumulasi Penyusutan 2022	Nilai Buku 2021	MUTASI LINTAS OPD	Beban Penyusutan Semester I 2023	Beban Penyusutan Semester II 2023	AKUMULASI PENYUSUTA N 2023	Nilai Buku 2022	Beban Penyusutan Semester I 2024	Beban Penyusutan Semester II 2024	AKUMULASI PENYUSUTA N 2024	Nilai Buku 2024	
188-03.01.01-01	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2017	409.166.666,67	600	681.944,44	60	40.916.666,67	368.250.000,00	72,00	4.091.666,67	4.091.666,67	49.100.000,00	360.066.666,67	49.100.000,00	-	-	-	49.100.000,00	-	49.100.000,00